

KESIAPAN PUSTAKAWAN MENGHADAPI PENERAPAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) TAHUN 2015

Muhammad Sabri Ali

Pustakawan Muda Perpustakaan B.J.Habibie

Abstrak

Salah satu poin kesepakatan AEC (Asean Economic Community) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 adalah aspek tenaga kerja terampil yang tidak lagi dibatasi dengan batas-batas negara dalam persaingan pasar tenaga kerja. Profesionalisme dan kompetensi SDM menjadi barometer dalam persaingan, termasuk di dalamnya tenaga pustakawan. Beberapa tantangan profesi pustakawan di Indonesia dalam menghadapi AEC adalah adanya ketimpangan jumlah pustakawan yang masih sangat kurang dibanding dengan jumlah lembaga perpustakaan yang ada, pustakawan yang tersertifikasi masih sangat kurang, dan citra perpustakaan dan pustakawan belum terbangun dengan baik. Pengembangan dan pembinaan Pustakawan yang berdaya saing menjadi tanggungjawab lembaga-lembaga terkait, diantaranya Perguruan Tinggi, Perpustakan, pemerintah daerah, organisasi profesi, lembaga sertifikasi, dan lembaga-lembaga lainnya berafiliasi dengan kepustakawanan. Lembaga dan organisasi tersebut harus bersinergi memikirkan konsep yang strategis, terpadu dan menyeluruh terhadap kebijakan pengembangan SDM perpustakaan yang berkesinambungan baik dari segi jumlah dan kualitas. Pustakawan yang memiliki keunggulan kompetitif adalah pustakawan profesional dan mempunyai kompetensi, berupa tenaga kerja terampil yang produktif, inovatif, kreatif, mempunyai semangat kerja, dan loyal terhadap organisasi atau lembaga. Hal tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan maupun dari pengalaman kerja.

Kata Kunci : *AEC (Asean Economi Community), Pustakawan, kompetensi*

Abstract

One of the points of agreement AEC (ASEAN Economic Community) or the Asean Economic Community (AEC) in 2015 is the aspect of skilled labor which is no longer limited by the boundaries of the state in the competitive labor market. Professionalism and competence of human resources becomes a barometer in the competition, including librarian. Some challenges of professional librarians in Indonesia in the face of the AEC is the imbalance of the number of librarians is still very poor compared with the number of existing library, a certified librarian is still lacking, and the image of libraries and librarians have not been well. Development and coaching competitive librarian is the responsibility of relevant institutions, including universities, the national library, the local government, professional organization, certification agencies, and other institutions affiliated with librarianship. Institutions and organizations must work together to think about the concept of a strategic, integrated and comprehensive human resource development policy towards sustainable library in terms of both quantity and quality. Librarians who have a competitive advantage is a professional librarian and have the competence, in the form of skilled labor that is productive, innovative, creative, have a spirit, and loyalty to the organization or institution. It can be obtained through formal education, training or work experience.

Keywords: *AEC (ASEAN Economic Community), librarian, competence*

Pendahuluan

Pengaruh globalisasi telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, hal ini juga berdampak pada persaingan global. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari komunitas global dituntut mampu mengambil peluang dan berperan lebih luas dalam memanfaatkan potensi tersebut dengan mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi persaingan global tersebut.

Salah satu tantangan yang sudah di depan mata adalah diterapkannya AEC (Asean Economic Community) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 dan APEC (Asia Pacific Economic Community) tahun 2020. Penerapan kesepakatan bersama ini mengubah ASEAN dimulai tahun 2015 dan tingkat ASIA di tahun 2020 menjadi wilayah dengan pergerakan barang, jasa, investasi, **tenaga kerja terampil**, dan aliran modal yang lebih bebas.

Terkhusus untuk MEA, merupakan kerjasama wilayah meliputi pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM; pengakuan terhadap kualifikasi profesional; konsultasi kebijakan makro ekonomi dan keuangan; langkah-langkah pembiayaan perdagangan; peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi; pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah; dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun AEC⁽¹⁾.

Aspek SDM merupakan salah satu yang menjadi kesepakatan dalam MEA, arus tenaga kerja terampil tidak lagi dibatasi dengan batas-batas Negara, namun profesionalisme dan kompetensi SDM menjadi barometer dalam persaingan pasar tenaga kerja. Tantangan tersebut, menjadikan kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil yang berkualitas tidak lagi hanya menjadi slogan dan pelengkap misi dan visi suatu lembaga atau organisasi. Dunia kerja dewasa ini membutuhkan SDM profesional yang dapat didayagunakan untuk merealisasikan visi dan misi dari sebuah organisasi. SDM profesional dan mempunyai kompetensi adalah mereka yang memiliki keunggulan kompetitif, berupa tenaga kerja yang produktif, inovatif, kreatif, mempunyai semangat kerja, dan loyal terhadap organisasi atau lembaga. Hal tersebut tidak bisa wujud begitu saja, namun diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan maupun dari pengalaman kerja yang mereka telah dapatkan.

Begitu juga halnya dalam lembaga atau organisasi perpustakaan dan informasi, sumber daya pustakawan merupakan salah satu sub sistem perpustakaan yang setiap saat harus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi mereka agar dapat menghadapi berbagai tantangan dan perubahan akibat globalisasi dari berbagai aspek kehidupan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil

Penerapan AEC tahun 2015 siap atau tidak siap akan dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini sudah di depan mata, AEC adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN. ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana salah satunya akan terjadi arus **tenaga terampil** yang bebas di antara 10 negara Asean, maka dipastikan akan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara ASEAN. Para warga negara dapat keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan di negara yang dituju.

Tenaga kerja dalam blueprint AEC dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (*skilled labour*) dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*). secara umum *skilled labor* dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai ketrampilan atau keahlian khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademisi atau sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja.⁽²⁾

Berkompetisi dengan SDM dari luar tidak semudah yang kita bayangkan, harus dengan kesiapan yang matang. Ketersediaan SDM di negara-negara Asean sudah merata, bahkan jika dilihat dari data-data yang dirilis oleh Badan PBB untuk program pembangunan, UNDP, menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2013 berada pada peringkat 121 dari 187 negara. Peringkat Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara anggota ASEAN, seperti Singapura peringkat 18, Brunei Darus-salam peringkat 30, Malaysia peringkat 64, Thailand peringkat 103 dan Filipina peringkat 114.⁽³⁾

Dengan Kondisi ini, pertanyaan besarnya, apakah SDM kita sudah menunjukkan kesiapan menghadapi AEC tersebut? Dari data UNDP di atas, maka untuk dapat bersaing Indonesia harus “berlari kencang” mempersiapkan SDM, setidaknya mendekati peringkat Negara-negara asean lainnya. Hal ini harus menjadi tantangan dan peluang bagi SDM Indonesia, tak terkecuali

bagi Pustakawan atau pengelola perpustakaan. Kesiapan untuk berkompetisi sangat ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme SDM, pendidikan, kompetensi dalam bidang kepustakawan, penguasaan bahasa, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi syarat mutlak untuk bersaing dengan SDM dari luar.

Kondisi SDM Pustakawan Indonesia

Berdasarkan data Perpustakaan Nasional yang diungkapkan oleh Deputy Bidang Pemberdayaan Perpustakaan, **Woro Salikin (2014)** dari kurang lebih 3000 Pustakawan, baru 100 pustakawan tersertifikasi, dan hal tersebut akan ditingkatkan jumlahnya secara bertahap. Menurut jumlah pustakawan tersebut, masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah perpustakaan yang ada di Indonesia. Jumlah perpustakaan sendiri kata beliau, sekitar 280.490 perpustakaan yang terdaftar di Perpustakaan Nasional. Jumlah itu terdiri atas 490 perpustakaan daerah dan 280 ribuan perpustakaan sekolah dan PT.⁽⁴⁾

Data yang lain, **Bambang Supriyo Utomo (2012)** memberikan ILUSTRASI (di luar Perpustakaan Swasta) Jumlah (pejabat) pustakawan PNS sampai tahun 2012 relatif kurang berkembang, sekitar 3.300 orang, dimana lebih dari 50% ada di Pulau Jawa, dengan komposisi terbanyak ada di Perpustakaan Perguruan Tinggi Jumlah Perpustakaan Umum Pembina di daerah (diluar Perpustakaan) : Perpustakaan Provinsi 34 lembaga + Kabupaten/Kota 501 lembaga Jumlah perkiraan kebutuhan minimal (untuk operasional & pembinaan) pustakawan (PNS) pada perpustakaan umum pembina Provinsi: 34 x 20 orang, dan Kab/Kota : 501 x 10 orang, seluruhnya = 680 + 5010 = 5.690 orang (baru terpenuhi 850 orang = 15%) Jumlah sekolah negeri (SD, SLTP, SLTA, termasuk MD) = 153.000 + 3.900□ sekolah, bila setiap sekolah harus memiliki satu pustakawan, maka jumlah kebutuhan minimal seluruhnya = 156.900 orang (baru terpenuhi 180 orang = 0,12%).⁽⁵⁾

Data-data di atas menunjukkan keterpenuhan kebutuhan pustakawan di Indonesia masih sangat jauh dari harapan, Kebutuhan pustakawan untuk perpustakaan umum provinsi dan kabupaten kota baru terpenuhi 15%, untuk pustakawan perpustakaan sekolah hanya 0,12% dari kebutuhan jumlah sekolah yang dikelola pemerintah,

komposisi pustakawan sebagian besar baru tersebar di PT. Data tersebut baru untuk institusi pendidikan dan lembaga pemerintah, belum terdata untuk kebutuhan lembaga swasta yang jauh lebih banyak.

Kekurangan tenaga pustakawan begitu besar tersebut, bisa dilirik oleh tenaga kerja pustakawan dari Negara tetangga yang mempunyai kompetensi dibidang perpustakaan, dimana sebagian besar pimpinan dan tenaga pengelola perpustakaan di Indonesia masih diisi oleh mereka yang tidak memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Kondisi di atas menunjukkan kebutuhan tenaga perpustakaan atau pustakawan masih sangat tinggi. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi lembaga-lembaga terkait seperti Perguruan Tinggi, Perpustakaan Nasional, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan Lembaga Sertifikasi Pustakawan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap eksistensi dan kompetensi SDM perpustakaan. Lembaga dan organisasi tersebut harus bersinergi memikirkan konsep secara strategis, terpadu dan menyeluruh terhadap kebijakan pengembangan SDM perpustakaan yang berkesinambungan.

Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Nasional diharapkan dapat menghasilkan luaran sarjana perpustakaan dan tenaga-tenaga terlatih dibidang perpustakaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lembaga pendidikan tinggi didorong untuk membuka program-program studi Perpustakaan dan Informasi yang baru, Pengelola program studi perpustakaan yang sudah eksis dituntut menyiapkan kurikulum berbasis kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan lembaga yang mengelola sumber-sumber informasi dan ilmu pengetahuan baik yang tercetak maupun elektronik (berbasis ICT).

Tantangan lain aspek kepustakawanan di Indonesia adalah citra terhadap profesi pustakawan, profesi tersebut belum menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa maupun pencari kerja. Fakta yang ada di masyarakatpun menunjukkan bahwa pustakawan adalah merupakan pekerjaan yang tidak populer dan bukan merupakan cita-cita atau harapan bagi kebanyakan orang. Di tengah-tengah masyarakat kita, pustakawan masih sangat jarang. Kondisi ini disebabkan antara lain : pekerjaan pustakawan belum menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan menjadi pustakawan bukanlah pekerjaan yang menjanjikan dari segi finansial dan bukan profesi bergengsi. Menjadi pustakawan terkadang malah

disembunyikan karena mereka beranggapan bahwa bekerja di perpustakaan adalah tempat bekerja orang yang dipinggirkan, mereka merasa rendah diri dengan statusnya. Masih banyak orang yang berpadangan bekerja sebagai pustakawan atau pengelola perpustakaan adalah pekerjaan yang kurang menarik, dipandang sebelah mata, dianggap sebagai pegawai “kelas 2”, di perpustakaan merupakan tempat yang kumuh dan kurang perhatian, perpustakaan menjadi tempat pembuangan pegawai yang bermasalah dan banyak lagi konotasi negative yang dilekatkan dengan perpustakaan.

Adanya pandangan-pandang seperti ini yang muncul dari luar maupun internal pustakawan sendiri menjadikan citra perpustakaan sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan dapat terdegradasi. Lain halnya jika pustakawan mau berbangga diri dan menunjukkan sikap dan unjuk kerja yang professional, menunjukkan kompetensi serta dapat mempromosikan tentang kelebihan suatu perpustakaan dan pustakawan tentu akan terjadi hal sebaliknya. Masyarakat akan mengetahui akan beratnya tantangan menjadi seorang pustakawan karena harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan informasi yang tidak hanya berasal dari buku akan tetapi sudah menjangkau dunia maya dan elektronik.

Pengembangan & Pembinaan Profesi Pustakawan

Kesiapan menghadapi MEA, khususnya persaingan tenaga kerja professional di bidang perpustakaan menjadi tantangan dan peluang pustakawan dalam meningkatkan kompetensinya, sehingga bisa kompetitif dengan SDM dari Negara-negara Asean lainnya. Upaya tersebut menjadi tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab lembaga terkait yang mempunyai afiliasi langsung dalam pembinaan kepustakawanan di Indonesia.

Upaya menghasilkan pustakawan yang mempunyai kompetensi dan daya saing dengan pustakawan dari Negara Asean lainnya, pustakawan harus ditopang dengan pengembangan dan pembinaan dari berbagai lembaga yang mempunyai relasi langsung dengan aktifitas pengembangan perpustakaan dan pembinaan pustakawan di Indonesia, Pembinaan yang dimaksud harus berkesinambungan dan bersinergi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Lembaga atau organisasi yang dimaksud diantaranya adalah ; Insitusi Pendidikan Tinggi, Perpustakaan Nasional, Pemerintah Daerah,

Institusi Perpustakaan, Organisasi Profesi pustakawan dan lembaga yang memberikan pengakuan atas kompetensi dalam hal ini Lembaga Sertifikasi Pustakawan (LSP) yang dibentuk secara independen.

Perguruan Tinggi (PT)

Program Studi Ilmu Perpustakaan yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi mempunyai tanggungjawab terhadap penyediaan pustakawan yang professional dan berdedikasi tinggi, mereka dituntut mampu menciptakan sarjana di bidang perpustakaan yang punya kompetensi di bidangnya. Wujud dari upaya tersebut dilakukan melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Perkembangan *Information Communication Technology* (ICT) menjadi peluang dan tantangan bagi pengelola Program studi untuk menerapkan kurikulum yang mengakomodasi perkembangan ICT. Pustakawan tidak hanya dituntut mampu mengelolah informasi dan sumber-sumber informasi konvensional, namun dewasa ini lulusan program studi perpustakaan selain mampu bekerja pada organisasi atau unit yang bergerak di bidang perpustakaan dan informasi, diharapkan juga ke depan mereka mempunyai jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) mampu bekerja secara mandiri dan membuka lapangan kerja baru.

Pengembangan kurikulum ilmu perpustakaan berbasis ICT di Perguruan Tinggi, akan menjawab tantangan bagaimana mendayagunakan secara optimal sumber-sumber informasi dalam berbagai format yang dihasilkan dari perangkat ICT. ICT telah memberikan dampak “banjir informasi”, dimana informasi dan ilmu pengetahuan merupakan kebutuhan yang vital bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kualitas hidup mereka, informasi tidak dapat dipisahkan dengan keberhasilan dunia pendidikan, penelitian, dunia bisnis, pemerintahan dan hampir semua aspek profesi membutuhkan *update* informasi dan ilmu pengetahuan.

Perpustakaan Nasional

Sebagai lembaga perwakilan pemerintah pusat Perpustakaan Nasional bertugas membuat kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan. Pembinaan dan pengembangan pengelolaan perpustakaan di Indonesia, serta pembinaan dan pengembangan SDM pengelola perpustakaan.

Tanggung jawab utama Perpustakaan Nasional yang cukup mendesak dalam menyongsong MEA adalah terkait yang diamanatkan dalam UU Perpustakaan No. 43 th 2007, kewajiban

pemerintah membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Menghadapi persaingan SDM pengelola perpustakaan dengan Negara Asean dibutuhkan proses pembinaan yang berkesinambungan dan terukur. Hal yang menggembirakan adalah terbentuknya Lembaga Sertifikasi Pustakawan (LSP) yang diprakarsai oleh Perpustakaan Nasional dan lembaga-lembaga terkait. Melalui LSP akan memendorong pengembangan karir pustakawan berbasis kompetensi. Melalui uji kompetensi pustakawan, LSP akan memberikan sertifikasi terhadap pustakawan. Sertifikasi yang diperoleh memberikan jaminan terhadap kompetensi, profesionalisme dan pengakuan terhadap profesi seorang pustakawan baik secara Nasional maupun Internasional sebagai modal untuk bersaing dengan SDM dari Negara-negara lain.

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam hal ini gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki tanggungjawab yang besar terhadap ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM Perpustakaan di daerah. Pemda harus meyakini dan memberikan perhatian yang besar terhadap peran perpustakaan sebagai penyedia jasa layanan informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya di wilayah daerahnya. Kondisi perpustakaan di daerah baik perpustakaan umum maupun perpustakaan sekolah belum memberikan espektasi yang baik bagi masyarakat. Berbagai faktor penyebab diantaranya, keterbatasan sarana perpustakaan yang disediakan ditingkat kecamatan dan desa yang merupakan pusat aktifitas masyarakat, tenaga pengelola perpustakaan sekolah di daerah mayoritas tenaga diperbantukan seperti guru, tenaga administrasi, honorer yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola perpustakaan. Ini menjadi potret ketidak berpihakan pemda dan dinas terkait terhadap Perpustakaan di daerah.

Formasi yang memadai untuk Pustakawan dalam penerimaan PNS harus disediakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya untuk perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah yang sangat minim secara kuantitas jika dilihat dari data yang telah dipaparkan di atas, baru sekitar 0.12% untuk perpustakaan sekolah, dan untuk perpustakaan umum baru 15% dari jumlah minimal pustakawan yang dibutuhkan.

UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 8, sangat jelas mengamanatkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kota berkewajiban dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, pelayanan perpustakaan yang merata, kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat, promosi minat baca melalui pemanfaatan perpustakaan di daerahnya masing-masing. Amanat PP No. 24 Th. 2014 Tentang Pelaksanaan UU 43 Tahun 2007 pasal 83 ayat f, mewajibkan setiap sekolah/madrasah untuk mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari dana anggaran operasional sekolah/madrasah setiap tahunnya. Hal ini seharusnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kepustakawanan di daerah masing-masing⁽⁶⁾.

Organisasi Profesi

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai organisasi profesi yang mewadai pustakawan, memiliki tanggungjawab moral untuk, melakukan pembinaan yang berkesinambungan yang dapat memberikan jaminan kompetensi dan profesionalitas setiap anggotanya, Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri, lebih menghargai profesinya, sehingga berdampak pada peningkatan daya kreatifitas dan produktifitas pustakawan.

Ikatan Pustakawan Indonesia berkewajiban memberikan dukungan dan kontribusi positif bagi para anggotanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melahirkan berbagai inovasi untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan dari profesi itu sendiri, baik berdasarkan pemikiran kritis maupun riset. Dalam hal ini, kerja sama mutualistik antara organisasi profesi dengan berbagai perguruan tinggi yang melahirkan anggota-anggota profesi yang bersangkutan mutlak diperlukan. IPI harus terus mengupayakan pengembangan profesi pustakawan yang berkesinambungan dan merata bagi anggotanya, mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi dan profesionalisme pustakawan, misalnya dengan mengagendakan diklat kepustakawanan, kegiatan seminar, lokakarya, menulis, mengajar dan melakukan penelitian yang akan semakin meningkatkan wawasan pustakawan tentang bidang ilmunya. Selain itu IPI mempunyai tanggungjawab terhadap terpenuhinya hak-hak dan kewajiban pustakawan.

Untuk menjaga wibawa dan martabat profesi pustakawan, IPI dituntut memperkuat manajemen organisasi hingga ditingkat kabupaten

kota, kemudian menetapkan, memelihara dan menegakkan kode etik profesi untuk tidak dilanggar oleh para anggotanya, sehingga pelayanan profesi tidak tercemari oleh berbagai bentuk penyimpangan praktik profesi yang berkaitan dengan keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja pustakawan.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan

Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. 82 Th 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Perpustakaan menjadi harapan besar pengembangan karir pustakawan berbasis kompetensi melalui uji standar kompetensi pustakawan atau memberikan sertifikasi terhadap pustakawan. Terbitnya SKKNI bidang perpustakaan mendorong terbentuknya LSP Pustakawan.

Lembaga Sertifikasi Profesi pustakawan merupakan lembaga independen penyelenggara sertifikasi pustakawan secara nasional yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam menjalankan tugasnya lembaga ini berpedoman pada tujuan SKKNI Bidang Perpustakaan, yakni:

1. Meningkatkan profesionalisme pustakawan dalam menjalankan perannya sebagai mediator dan fasilitator informasi.
2. Menjadi tolak ukur kinerja pustakawan.
3. Menghasilkan pengelompokan keahlian pustakawan sesuai dengan standardisasi yang telah divalidasi oleh lembaga sertifikasi.
4. Memberi arah, petunjuk dan metode atau prosedur yang baku dalam menjalankan profesinya dengan mengedepankan kode etik kepustakawanan Indonesia.⁽⁷⁾

Menurut Endang Ernawati (2014) dalam proses sertifikasi kompetensi pustakawan, LSP akan melakukan serangkaian pengujian kompetensi berdasarkan SKKNI bidang perpustakaan. Pengujian kompetensi melalui proses asesmen dan melalui metode tertentu. Adapun kompetensi yang diujikan terdiri dari *Kompetensi Umum*, yaitu kompetensi dasar yang dimiliki oleh setiap pustakawan dan diperlukan untuk melakukan tugas di Perpustakaan. *Kompetensi Inti*, yaitu kompetensi fungsional yang harus dimiliki setiap pustakawan dalam menjalankan tugas perpustakaan. *Kompetensi khusus*, merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik dan berfungsi untuk meningkatkan aktualitas diri pustakawan⁽⁸⁾.

Untuk memenuhi tujuan dari SKKNI dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sertifikasi di atas, LSP Pustakawan bertanggungjawab memfasilitasi dan mendorong pustakawan baik yang bersatus PNS maupun Swasta segera mengikuti dan mendapatkan sertifikasi Pustakawan. Memfasilitasi dalam arti memberikan kemudahan bagi pustakawan dalam mengikuti uji kompetensi, menyediakan tenaga assessor yang cukup, menyediakan dan memfasilitasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang mudah, tidak hanya di Jakarta, namun membentuk TUK di setiap Provinsi.

Pustakawan Ideal dan Kompetitif

Sinergitas antara berbagai lembaga yang mempunyai tanggungjawab terhadap pengembangan dan pembinaan pustakawan dalam hal ini Perpustakaan, Perguruan Tinggi, Pemda, IPI dan LSP diharapkan akan mampu menghadirkan pustakawan yang ideal dan kompetitif.

Pustakawan ideal dan kompetitif menurut dalam materi Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli yang di sampaikan oleh **Muhtar Arifin Sholeh (2007)** adalah pustakawan yang secara umum memenuhi kompetensi-kompetensi seorang pustakawan, yaitu kompetensi pribadi (*personal competence*), kompetensi sosial (*social competence*), kompetensi profesional (*professional competence*), dan kompetensi keterampilan (*skill competence*). Sebuah kompetensi pribadi adalah kepribadian yang luhur, sehat jasmani dan rohani, berpenampilan menarik.

Kompetensi sosial komunikasi yang baik adalah, atensi terhadap orang lain, senyum, salam, sapa, sopan-santun, rela membantu (*helpful*), kerja sama, ramah, kepemimpinan. Sedangkan kompetensi profesional adalah seorang pustakawan haruslah berijazah/bersertifikat pendidikan perpustakaan, penguasaan ilmu informasi & perpustakaan, penguasaan teknologi informasi – komunikasi. Arti dari kompetensi ketrampilan bahwa pustakawan harus bisa mengembangkan ketrampilan berpikir, ketrampilan tangan, kreatif serta inisiatif.⁽⁹⁾

Menurut Bambang Supriyo Utomo (2012) menunjukkan 9 syarat seorang pustakawan dapat dikatakan profesional, diantaranya :

1. Menguasai (mengerti dan memahami) pekerjaan yang dipercayakan/dilakukan
2. Memiliki loyalitas tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan lembaga (dengan prinsip hidup bahwa apa yang dikerjakan bukanlah suatu beban, tapi merupakan panggilan hidup)

3. Memiliki integritas tinggi terhadap lembaga (mengedepankan kepentingan & keberhasilan misi lembaga)
4. Bekerja keras dan mampu membangun kerjasama dalam setiap penugasan
5. Memiliki visi (visioner) dan sasaran yang jelas
6. Memiliki kompetensi dan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai pekerjaan
7. Memiliki daya kompetitif dan inovatif
8. Memiliki motivasi kerja dan kebanggaan terhadap pekerjaannya
9. Memiliki dan menjadi anggota organisasi profesi

Lebih lanjut menurut **Bambang Supriyo Utomo (2012)** pustakawan profesional yang berhubungan langsung dengan etos kerja adalah pustakawan yang mampu menjalankan manajemen system mutu, mampu melaksanakan tugas sesuai prosedur, pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan juknis (Petunjuk Teknis); mampu melaksanakan pekerjaannya dengan sepenuh hati, dan bangga akan hasil pekerjaannya disebabkan pelanggannya puas⁽¹⁰⁾.

Dari beberapa pandangan di atas dapat dimaknai bahwa Pustakawan ideal dan kompetitif adalah Pustakawan profesional dan mempunyai kompetensi, mereka yang memiliki keunggulan kompetitif, baik secara pribadi, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Menjadi tenaga kerja terampil yang produktif, inovatif, kreatif, mempunyai semangat kerja, dan loyal terhadap organisasi atau lembaga. Kompetensi dan profesionalisme yang mereka dapat peroleh baik melalui pendidikan formal, pelatihan maupun dari pengalaman kerja.

Kesimpulan

Aspek tenaga kerja terampil merupakan salah satu yang menjadi kesepakatan dalam AEC (Asean Economic Community) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, arus tenaga kerja terampil tidak lagi dibatasi dengan batas-batas Negara, namun profesionalisme dan kompetensi SDM menjadi barometer dalam persaingan pasar tenaga kerja.

Kebutuhan tenaga perpustakaan atau pustakawan masih sangat tinggi, menjadi tantangan dan peluang bagi lembaga-lembaga terkait seperti Perguruan Tinggi, Perpustakaan pemerintah daerah, organisasi profesi, lembaga sertifikasi sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap eksistensi dan kompetensi SDM perpustakaan. Lembaga dan organisasi tersebut

harus bersinergi memikirkan konsep secara strategis, terpadu dan menyeluruh terhadap kebijakan pengembangan SDM perpustakaan yang berkesinambungan.

Pustakawan profesional dan mempunyai kompetensi adalah mereka yang memiliki keunggulan kompetitif, berupa tenaga kerja terampil yang produktif, inovatif, kreatif, mempunyai semangat kerja, dan loyal terhadap organisasi atau lembaga, yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan maupun dari pengalaman kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Asean. 2014. *Asean Economic Community* <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/>; (diakses pada tanggal 8 September 2014)
- Endang Ernawati, 2014. *Sertifikasi kompetensi pustakawan : manfaat dan pengaruhnya terhadap jenjang karir pustakawan di Perpustakaan Perguruan Tinggi*. (Makalah disampaikan pada seminar dan workshop pemanfaatan bersama E-Resources, Sertifikasi, Jabatan fungsional pustakawan dan kompetensi pustakawan menghadapi MEA 2015, 23-24 Juni 2014, UI Jakarta. (<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/667/jbptunikompp-gdl-ubudiyahse-33349-14-sertifik-i.pdf>) (diakses September 2014)
- Indonesia. Kementerian Perdagangan. 2014. *Menuju Asean Economic Community 2015*. http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf (diakses tanggal 8 September 2014)
- Rahmadhani, Suhersi. 2014. *Menciptakan citra perpustakaan ideal dalam masyarakat*. Sumber: <http://www.pemustaka.com/citra-perpustakaan-ideal.html#ixzz1rylBX1rN> (diakses 15 September 2014).
- Republika. 2014. *Sekolah wajib sisihkan 5 persen untuk perpustakaan*. <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/14/01/28/n03re1-sekolah-wajib-sisihkan-5-persen-untuk-perpustakaan>, (diakses 11 September 2014)
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang tentang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007*. Jakarta : Perustakaan Nasional RI, 2007.
- Republik Indonesia, 2012. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor jasa kemasyarakatan, sosial*

budaya, hiburan, dan perorangan lainnya bidang perpustakaan menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2012.

Supriyo Utomo, Bambang. 2012. *Profesi Pustakawan : Jantung Perpustakaan dan Tenaga Fungsional Profesional.* (Presentasi disampaikan Pada Seminar Nasional Perpustakaan & Kepustakawanan Convention Hall UIN Sunan

Kalijaga, Yogyakarta 8 Desember 2012) <http://www.slideshare.net/setyo14/yogya-uin-membangun-pustakawan-profesional-08122012vf> (diakses oktober 2015)

VOA Indonesia. 2014. *UNDP Indeks Pembangunan Indonesia Naik.* <http://m.voaindonesia.com/a/undp-indeks-pembangunan-indonesia-naik/1624179.html> (diakses 9 september 2014)